



## **PERAN TENTARA DALAM POLITIK ORDE BARU: STUDI KASUS SOEHARTO DAN ABRI**

**Naomy Elisabeth Tamba<sup>1</sup>, Jessica Simanjuntak<sup>2</sup>, Ayu Linsa Buulolo<sup>3</sup>, Sophia  
Rheina Surbakti<sup>4</sup>**  
**Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan,  
Indonesia<sup>1234</sup>**

**naomitamba02@gmail.com<sup>1</sup>, jessicasimanjuntak71@gmail.com<sup>2</sup>,  
ayulinsabl@gmail.com<sup>3</sup>, soviasurbakti@gmail.com<sup>4</sup>**

Accepted: 10 Agustus 2023

Published: 29 Agustus 2023

### **Abstract**

This study aims to analyze the role of the army in New Order politics in Indonesia, focusing on the policies and actions of President Suharto and the Armed Forces of the Republic of Indonesia (ABRI). The New Order was an important period in Indonesian history marked by military rule under General Suharto for more than three decades. This research uses historical research methods to explore historical records, government policies, and the role of ABRI in the formation and maintenance of New Order political power. Through an in-depth analysis of primary and secondary sources, this study attempts to answer several key questions, including how ABRI's role in maintaining political stability during the New Order, how the relationship between Suharto and ABRI influenced policymaking, and how this role influenced Indonesia's political, economic, and social development. The results showed that ABRI had a key role in maintaining the New Order regime by providing security support, supervising the political opposition, and being involved in key policymaking. The close relationship between Suharto and ABRI also established a strong power dynamic in Indonesia during this period. In addition, ABRI's role in managing social and political conflicts has an impact on the social and economic development of the country. This research provides in-depth insight into the role of the military in New Order politics and its relevance to political developments in Indonesia today. The political and social implications of ABRI's role in the New Order will also be discussed, as well as its impact on the democratic transition in Indonesia after the fall of the Suharto regime.

**Key words:** *New Order, Suharto, ABRI, Indonesian politics, Military.*

**How to Cite:** Tamba, N. E., Simanjuntak, J. et. Al. (2023) Peran Tentara Dalam Politik Orde Baru: Studi Kasus Soeharto dan ABRI. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah* (373-378)

\*Corresponding author:  
[naomitamba02@gmail.com](mailto:naomitamba02@gmail.com)

ISSN 2460-5786(Print)  
ISSN 2407-7429 (Online)

## INTRODUCTION

Dalam jurnal "Peran Tentara dalam Politik Orde Baru: Studi Kasus Soeharto dan ABRI" mengangkat fokus pada peran yang dimainkan oleh Tentara dalam konteks politik Orde Baru, dengan penekanan pada studi kasus kepemimpinan Soeharto dan peranan ABRI. Dalam dekade-dekade setelah kemerdekaan Indonesia, peran militer telah menjadi elemen signifikan dalam perkembangan politik negara ini. Era Orde Baru, yang ditandai dengan pemerintahan otoriter di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto, menyaksikan integrasi yang kuat antara kekuatan militer dan struktur pemerintahan.

Pada periode ini, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) memegang peran yang penting dalam menjaga stabilitas politik, mengambil bagian dalam pembentukan kebijakan, dan mendukung pemerintahan Soeharto. Oleh karena itu, tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai dinamika interaksi antara militer dan politik dalam konteks Orde Baru, dengan fokus pada studi kasus Soeharto dan ABRI.

Melalui analisis mendalam terhadap peran ABRI dalam membentuk kebijakan dan mempengaruhi proses politik pada masa pemerintahan Soeharto, diharapkan bahwa jurnal ini akan memberikan wawasan yang lebih kaya tentang bagaimana militer dapat berperan dalam politik dan bagaimana dinamika tersebut memengaruhi perkembangan sosial dan politik di Indonesia pada saat itu.

Politik Orde Baru di Indonesia, yang dimulai pada tahun 1966 dengan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan, adalah sebuah periode yang sangat menentukan dalam sejarah politik dan militer Indonesia. Dalam periode ini, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola negara dan membentuk kebijakan nasional. Dalam konteks ini, peran Soeharto sebagai seorang jenderal dalam ABRI dan kemudian sebagai Presiden Republik Indonesia sangat menonjol

Penelitian ini bertujuan untuk

menginvestigasi secara lebih mendalam peran Tentara dalam Politik Orde Baru dengan fokus pada peran kunci Soeharto dan ABRI dalam menjaga stabilitas politik dan mengambil kebijakan yang mempengaruhi arah perkembangan politik, ekonomi, dan sosial Indonesia selama periode ini. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji perubahan dalam dinamika politik Indonesia yang dipicu oleh campur tangan militer dan dampak jangka panjangnya.

## METHODOLOGY

Penelitian sejarah Merupakan proses yang kompleks karena menyangkut eksistensi ( nilai, moral, agama dan kebudayaan) suatu bangsa dan manusia pada masa lampau masa kini, dan masa depan titik Selain itu penelitian sejarah dilakukan melalui langkah tertentu.

Menurut Gilbert J. Garraghan, metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan atau prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber sejarah secara efektif, nilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hal-hal yang dicapai dalam bentuk tertulis. Senada dengan pengertian ini, Louis Gottschalk dalam bukunya *Mengerti Sejarah* (1995:27) menjelaskan bahwa metode sejarah adalah suatu kegiatan mengumpulkan, menguji, dan menganalisis data yang diperoleh dari peninggalan-peninggalan masa lampau titik data-data tersebut kemudian direkonstruksi sehingga menghasilkan sisa sejarah.

Dalam buku *Pengantar Ilmu Sejarah*(2005: 90) , Kuntowijoyo menjelaskan penelitian sejarah memiliki 5 tahapan yang saling berhubungan kelima tahapan tersebut yaitu pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber) , verifikasi, penafsiran dan penulisan. Metode merupakan sebuah prosedur, atau ada hubungannya dengan suatu prosedur, proses, atau tehnik yang sistematis dalam penyidikan disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-bahan) yang diteliti (Sjamsuddin, 2007: 13).

Metode sejarah adalah metode atau cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian peristiwa sejarah dan permasalahannya. Metode ini merupakan

instrument untuk merekonstruksi peristiwa sejarah (history as past actuality) menjadi sejarah sebagai kisah (history as written). Metode ini merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk merekonstruksi kejadian-kejadian di masa lampau.

## RESULT AND DISCUSSION

Pada masa awal kelahirannya, Orde Baru yang diidentikkan dengan Soeharto sebagai presiden yang berlatar belakang militer telah menyadari bahwa tugas dari kaum militer bukanlah untuk membuat kebijakan-kebijakan perekonomian. Dia mempercayakan pembuatan kebijakan ekonomi tersebut kepada orang-orang sipil, khususnya kepada sekelompok ahli ekonomi dari Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Widjojo Nitisastro.

Ciri terpenting bentuk daripada perpolitikan yang dijalankan oleh Orde Baru pada masa awal terbentuknya rezim ini tahun 1967-1990 adalah dominannya peran politik militer melalui penerapan ideologi "dwifungsi ABRI" sehingga mensubordinasikan kekuatan politik lain secara relatif penuh. Sekalipun secara de facto "dwifungsi ABRI" telah dijalankan bersamaan dengan sejarah awal terbentuknya republik, namun perumusan dwifungsi ABRI sebagai sebuah konsepsi dan ideologi politik baru terjadi pada dekade 1950-an.

Dibawah kepemimpinan Orde Baru, TNI memiliki Dwifungsi yang diakibatkan oleh adanya kebijakan Jenderal Soeharto, salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah adanya keterlibatan militer dalam fungsinya sebagai kekuatan sosial dalam upaya membangun bangsa, konsep ini lebih dikenal dengan Dwifungsi ABRI (Samego, 1998:59). Dwifungsi ABRI yaitu sebagai kekuatan Hankam (Pertahanan dan Keamanan) dan fungsi kekuatan Sosial Politik, yang sangat berperan penting dalam mewujudkan stabilitas nasional yang menetap dan dinamis disegala aspek kehidupan bangsa, dalam rangka untuk mewujudkan tujuan nasional berdasarkan pancasila. Lahirnya konsep Dwifungsi ABRI digagas

oleh A.H Nasution pada 12 Novemer 1958 dan baru benar-benar diterapkan pada era Orde Baru karena Nasution sendiri merupakan pendiri dari IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) untuk memberikan kesempatan kepada Tentara atau militer berpolitik (Mabes ABRI dalam Fattah, 2005:144).

Pada masa kepemimpinan Jenderal Soeharto Dwifungsi ABRI bukan hanya berperan sebagai militer saja tetapi Dwifungsi ABRI juga dijadikan alasan ikut sertanya ABRI ke dalam semua aspek kehidupan bernegara (Marin dalam Fattah, 2005:138). Dalam hal tersebut Dwifungsi ABRI di dimanfaatkan oleh Jenderal Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya, dimana Jenderal Soeharto selaku pemimpin militer berupaya menggunakan suatu organisasinya dalam melaksanakan pemilu (pemilihan umum) guna memperkuat dan mempertahankan kepentingan dan kedudukan tentara dalam pemerintahan. Partai Golkar (Golongan Karya) merupakan salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Partai Golkar (Golongan Karya) berdiri sejak berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Soekarno.

Munculnya partai Golkar sebagai kekuatan baru sering dianggap sebagai kekuatan Orde Baru karena dalam kekuatan ini Golkar di dukung oleh tiga kekuatan dominan Orde Baru, Yaitu :

1. ABRI sebagai kekuatan kunci untuk melakukan tekanan atas kekuatan sipil yang mencoba mengganggu eksistensi Golkar.
2. Birokrasi dalam hal ini dibentuknya kokar-mendagri (Korps Karyawan Pemerintahan Dalam Negeri) sebagai cikal bakal munculnya "monoloyalitas" yang berarti kesetiaan tunggal terhadap suatu perkumpulan, negara dan sebagainya. Golkar akhirnya dikukuhkan melalui KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia).
3. Golkar dijadikan alat "Orde Baru" untuk melanggengkan kekuasaannya melalui formulasi yang dianggap demokratis dengan tata cara dan prosedur pemilihan

umum, sidang umum MPR dan dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat (Sundhaussen, Ulf. 1986:32).

Melihat besarnya peran ABRI pada masa pemerintahan Orde Baru yang tidak hanya berperan dalam bidang kemiliteran. Namun, ABRI juga berperan besar pada bidang Han-kam (Pertahanan dan Keamanan) dan Sosial Politik. Pada bidang Hankam ABRI tercatat pernah beberapa kali ikut dalam pemberantas pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948, pemberontakan G30/SPKI Tahun 1965, pemberontakan DI/TII, pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dan TNI juga tercatat pernah menganeksasi Timor-timor, karena keadaan politik dan berpartisipasi menormalisasikan hubungan Indonesia-Malaysia, dan program ABRI masuk desa Sedangkan, dalam bidang Sosial Poitik banyak perwiraperwira ABRI terutama dari Angkatan Darat yang duduk pada jabatan strategis dipemerintahan demi melang-gengkan rezim Pemerintahan Orde Baru

Dari asumsi di atas, ABRI sebenarnya memiliki dua peranan yang cukup signifikan dan seringkali dikenal dengan “dwifungsi ABRI”, yakni selain sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, ABRI juga merupakan kekuatan sosial- politik. Istilah dwifungsi yang menjadi dasar legitimasi bagi peran sosial-politik angkatan bersenjata sendiri mulai berkembang dan populer pada masa Orde Baru. Ini diawali dari konsepsi Nasution tentang “Jalan Tengah” ABRI pada 1958, yang intinya tentang pemberian kesempatan kepada ABRI, sebagai salah satu kekuatan politik bagsa untuk berperan serta di dalam pemerintahan atas dasar “Asas Negara Kekeluargaan”. Ditambah lagi dengan fakta pada Agustus tahun 1966, ABRI menyatakan kepeduliannya untuk ikut mengatasi tiga masalah nasional, yakni stabilitas sosial politik, stabilitas sosial ekonomi, dan kedudukan serta peran ABRI dalam revolusi Indonesia sebagai kekuatan revolusi, alat penegak demokrasi dan sebagai alat pertahanan dan keamanan negara.

Berikut adalah beberapa aspek hubungan antara Soeharto dan ABRI dalam mengonsolidasikan kekuasaan politik:

### **1. Pengambil Alihan Kepimpinan**

Pada tahun 1965, Soeharto memimpin upaya penggulingan pemerintahan Sukarno setelah peristiwa G30S/PKI. Selama krisis ini, Soeharto, yang saat itu adalah seorang jenderal di ABRI, berhasil memimpin pasukan ABRI dalam menghancurkan organisasi-organisasi yang terlibat dalam kudeta tersebut. Setelah berhasil mengambil alih kendali, Soeharto menduduki jabatan presiden. Setelah masa jabatan Presiden Soekarno berakhir pada Tahun 1967, akibat dari pem-berontakan G30S/PKI yang membuat dirinya dilengserkan dalam sidang MPRS Tahun 1966 (Crouch, 1999:225).

### **2. Peran Kunci ABRI**

ABRI berperan penting dalam mendukung Soeharto dalam mengkonsolidasikan kekuasaannya. Pasukan militer dan keamanan yang dipimpin oleh ABRI membantu menjaga stabilitas dan mengatasi pemberontakan yang terjadi pada masa transisi kekuasaan. ABRI juga berperan besar pada bidang Han-Kam (Pertahanan dan Keamanan).

Soeharto menggantikan Sukarno sebagai Panglima TNI, yang memberinya kendali langsung atas pasukan militer. Dengan kendali ini, Soeharto memiliki pengaruh yang kuat dalam tubuh militer, yang juga memiliki peran politik penting di Indonesia. Selain itu, banyak perwira militer dalam ABRI yang mendukung Soeharto dalam mengonsolidasikan kekuasaannya. Salah satu ciri pemerintahan Orde Baru adalah pelembagaan peran sosial politik ABRI.

ABRI berperan penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas selama masa transisi politik. Pasukan militer membantu menekan pemberontakan dan kerusuhan yang mungkin mengancam kestabilan negara.

Seiring berjalannya waktu, Soeharto mempertahankan kendali atas ABRI dan

menggunakan militer sebagai alat untuk mengawasi dan mempertahankan kekuasaannya. Dia juga mempromosikan banyak perwira militer yang loyal kepadanya ke posisi penting dalam pemerintahan dan administrasi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia lahir pada tanggal 1 Juli 1946, dan sering disebut hari Bhayangkara. Pada awalnya lembaga Kepolisian berada di bawah kendali Departemen Dalam Negeri, namun karena kewenangan Kepolisian yang sangat luas ini menjadi sangat terbatas serta mendapat kendala struktural dan operasionalnya. Pada tahun 1947, Indonesia menghadapi situasi perang, lembaga Kepolisian saat itu selain bertugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, polisi juga masih ikut berperang bersama kekuatan bersenjata seperti AD, AL dan AU untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang baru saja diraih. (Awaloedin, 2006, p. 129).

Setelah diadakan perundingan antara delegasi RI dan delegasi Belanda danditandatangani Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 2 Nopember 1949, di Den Haag mengharuskan Belanda harus keluar dari wilayah Indonesia dan Indonesiamenjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950. Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah perdana menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangkan dalam hal administrasi pembinaan, dipertanggungjawabkan pada Menteri Dalam Negeri. Namun demikian RIS juga tidak berusia lama karena banyak negara bagian ingin menggabungkan diri dengan RI (Dadi, 2013, p. 89).

Pada tanggal 1 Juli 1968, dalam peringatan hari Bhayangkara, Presiden Soeharto menekankan agar polisi kembali pada fungsinya sebagai lembaga Kepolisian seutuhnya. Peralihan ini terjadi berdasarkan pada ketentuan pokok Kepolisian dalam

Undang-undang No. 13 tahun 1961. Tanggal 27 Juni 1969, menurut Keputusan Presiden No. 52 tahun 1969, tentang sebutan, kedudukan organik dan tanggung jawab Kepolisian Negara sebagai unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Departemen Pertahanan Keamanan, memutuskan, mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 290 tahun 1964, dengan kata lain sebutan AKRI (Angkatan Kepolisian Republik Indonesia) yang sejenis dengan AD, AL, dan AU yang masih sifat militer, diubah menjadi POLRI (Polisi Republik Indonesia). (Soeparno, p. Hal 387).

Dalam melaksanakan tugasnya, POLRI diharapkan mau untuk mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi. Hal ini akan membuat "Citra Kepolisian" baik dimata masyarakat. Setiap anggota POLRI diharapkan mampu mengembangkan yang lebih luas agar dapat menjadi panutan masyarakat, seperti anggota POLRI dapat menjadi sosiolog, psikolog, bahkan dapat menjadi seorang pemuka agama. Sehingga masyarakat akan merasa dilindungi, diayomi, dan dilayani kepentingannya sesuai dengan prosedur polisi yang berlaku. (Ibid, p. hlm.379.)

## CONCLUSION

Penelitian ini telah menyelidiki peran tentara dalam politik Orde Baru di Indonesia dengan mengeksplorasi studi kasus kepemimpinan Soeharto dan peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) selama periode tersebut. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yang menggambarkan bagaimana tentara memainkan peran sentral dalam membentuk dan mempertahankan pemerintahan Soeharto.

Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa peran tentara dalam politik Orde Baru adalah sebuah fenomena yang signifikan. ABRI di bawah kepemimpinan Soeharto bukan hanya sebuah alat militer, tetapi juga menjadi pemegang peran politik yang kuat dalam pemerintahan. Militer mengendalikan berbagai aspek kebijakan dan pemerintahan, termasuk bidang politik, ekonomi, dan keamanan nasional.

Kedua, penelitian ini mengidentifikasi bahwa legitimasi Soeharto sebagai pemimpin ditopang oleh dukungan kuat dari ABRI. Tentara memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas politik, mengatasi potensi pemberontakan, dan mengamankan rezim Orde Baru. Hal ini menciptakan hubungan simbiosis antara Soeharto dan ABRI yang saling menguntungkan, di mana kekuatan politik Soeharto dijalankan melalui dukungan militer.

Ketiga, penelitian ini menyoroti dampak peran tentara terhadap dinamika politik dalam masyarakat. Dominasi militer dalam politik menciptakan lingkungan politik yang otoriter, di mana oposisi dan kritik terhadap rezim cenderung ditekan. Ini berdampak pada pembatasan kebebasan sipil, pembatasan media, dan keterbatasan partisipasi politik masyarakat sipil.

## REFERENCE LIST

- Anwar, (2018). Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia, Jurnal ADABIYA, Volume 20 No. 1
- Bayu Saptono (2013), PERALIHAN AKRI KE POLRI: SEBUAH ANALISIS HISTORIS (1966-1970): Journal
- FAIDA, I. PERANAN MILITER DALAM POLITIK INDONESIA PADA MASA ORDE BARU (1966-1998).
- Gunawan, Aditya Batara (2022) "Kontrol Sipil atas Militer dan Kebijakan Pertahanan di Indonesia Pasca Orde Baru," Jurnal Politik: Vol. 2: Iss. 2, Article 2
- Hariyanto, E. Peran politik militer (ABRI) orde baru terhadap depolitisasi politik Islam di Indonesia: Studi hegemoni politik militer orde baru terhadap politik Islam tahun 1967-1990.
- Kahfif, Syahdatul. "Peran Militer Indonesia: Tuntutan atau Kepentingan." PROGRESSIF Vol. 11, no. 1 Jakarta: Political Science Forum FISIP UI. 2002.
- Karim, Muhammad Rusli. Peranan ABRI dalam Politik dan Pengaruhnya terhadap

Pendidikan Politik di Indonesia 1965-1979. Jakarta: Haji Masagung, 1989.

- Kuntowijoyo. (1994). Metodologi Sejarah (Cet.1 ed.). Yogyakarta, Indonesia: Tiara Wacana Yogyakarta. Retrieved from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=116457>

Lane, Max. Bangsa Yang Belum Selesai: Indonesia, Sebelum dan Sesudah Soeharto. Jakarta: Reform Institute, 2007. Bayu Saptono (2013), PERALIHAN AKRI KE POLRI: SEBUAH ANALISIS HISTORIS (1966-1970): Journal

Rona.Henry.Yusuf. dan Yustina, (2022). DWIFUNGSI ABRI DALAM SOSIAL POLITIK SEBAGAI GERAKAN AKAR RUMPUT PADA MASA ORDE BARU, KRAKATOA: Journal of History, History Education and Cultural Studies